

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA
SATU SARJANA (KAJIAN PADA BAITUL MAL ACEH)**



Disusun Oleh :

**Mauizatul Aspira
NIM. 180603085**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mauizatul Aspira

NIM : 180603085

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022



Yang Menyatakan,

Handwritten signature of Mauizatul Aspira.

Mauizatul Aspira

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Beasiswa Satu
Keluarga Satu Sarjana (Kajian Pada Baitul Mal Aceh)**

Disusun Oleh:

Mauizatul Aspira
NIM. 180603085

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002


Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Mauizatul Aspira

NIM. 180603085

Dengan Judul:

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (KAJIAN PADA BAITUL MAL ACEH)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Inayatillah, M.A.Ek

NIP. 197404072000031004

Sekretaris,



Muksal, M.E.I.

NIP. 199009022020121008

Penguji I,



Fithriadi, Lc. M.A., Ph.D

NIP. 198008122006041001

Penguji II,



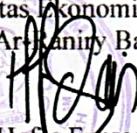
Rika Muliya, M.B.A

NIP. 19910306202203100

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mauizatul Aspira
NIM : 180603085
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Mauizatulasfira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Kajian Pada Baitul Mal Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Desember 2020

Mengetahui,

Penulis

Mauizatul Aspira
NIM. 180603085

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP.197410152006041002

Pembimbing II

Muksal, M.E.I
NIP.199009022020121008

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Kajian Pada Baitul Mal Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi (prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku Operator Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D dan Muksal, M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan

pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Isnaliana, S.H.I., M.A selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan saran maupun arahan terbaik untuk penulis beserta seluruh Bapak\Ibu dosen juga Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan ilmu selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Para pihak Baitul Mal Aceh yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini, kepada Yuwita, SH., MH dan Rizky Aulia, S.Pd.I yang telah membantu memberikan informasi kepada Penulis. Serta Mustahik Baitul Mal Aceh, kepada Firdaus, Nurul wahidah dan Rosmiati yang telah juga membantu memberikan informasi kepada penulis.
7. Keempat orang tua tercinta. Ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Mahdi dan Ibunda Safnawati yang telah memberikan banyak doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan moral maupun materil yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis beserta Ayahanda Muslim Alhadi dan Ibunda Faridah S sehingga penulis mampu memperoleh yang terbaik dan menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Kepada Nenek, bunda, Pak Yasir dan Bu Siti Sarah dan adik-adik penulis yaitu fandi, syakila, diani, maghfirah, zayyan, tahya serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan

semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya.

8. Sahabat-sahabat saya Nurul Azizah, Mufti Fatimah Azzahra, zilfa Radhiyyah, Putri Rahmadani, fahma dina bik Uswa, Zuliani fitra, Cut nanda Fitria, nurul isna juga teman-teman dan Mentor Organisasi Pusat Inkubasi Bisnis Islam FEBI, Asyifa Bimbel juga para kakak letting dan adeng letting yaitu kepada Della, Nelly, Cut, Miftah, Lisa dan lainnya serta para teman yang selalu memberikan dukungan. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah letting 2018 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis,

Mauizatul Aspira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Mauizatul Aspira
NIM : 180603085
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Program Beasiswa Satu
Keluarga Satu Sarjana
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

Pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merupakan salah satu program yang memiliki potensi dalam pengembangan masyarakat baik itu secara ekonomi, pribadi maupun sosial. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat serta mekanisme maupun optimalisasinya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS pada Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS meliputi tujuan tahapan-tahapan serta manfaat yang diperoleh, yang mana mekanisme tersebut masih kurang terealisasikan dengan baik. Sehingga optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS dilihat dari tiga dimensi optimalisasi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang diuraikan dengan beberapa indikator-indikator masih tergolong kurang optimal, karena banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi serta output yang kurang tercapai. Akan tetapi disebalik itu Baitul Mal Aceh sedang berupaya melakukan evaluasi, merancang sistem baru yang lebih baik yang diharapkan kedepannya dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS.

Kata kunci : Optimalisasi, pemberdayaan masyarakat, Baitul Mal

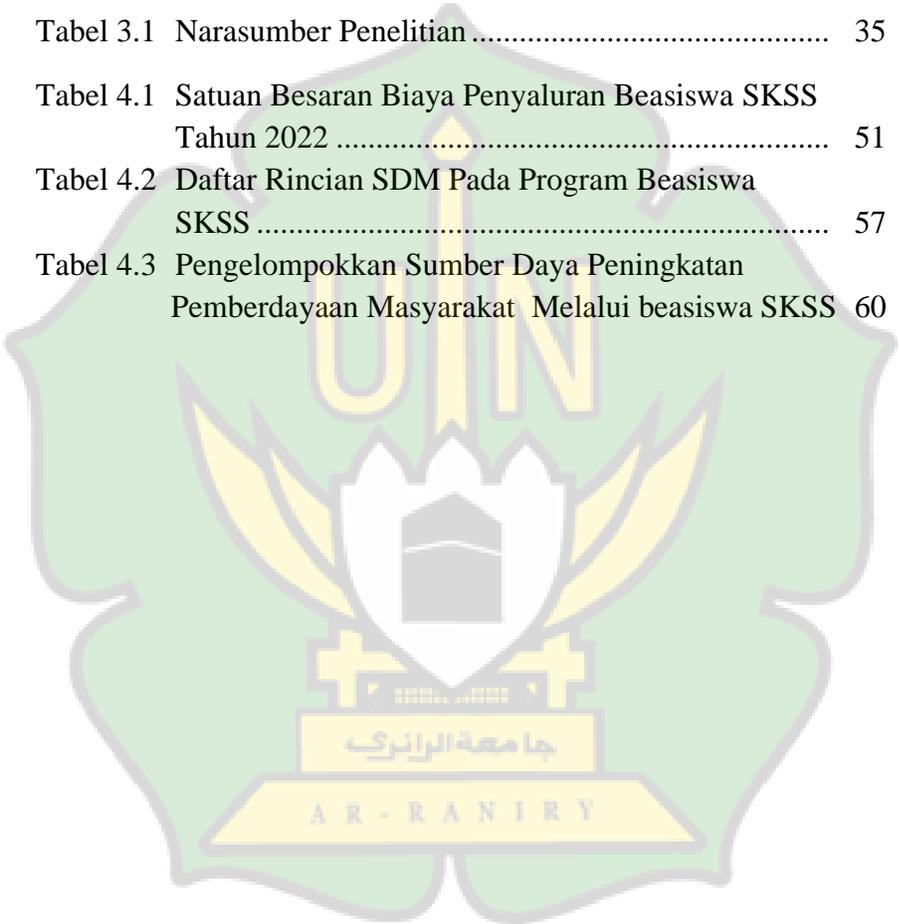
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat	11
2.1.1 Teori Optimalisasi.....	11
2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2.1.3 Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat	17
2.1.4 Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat	18
2.1.5 Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat.....	20
2.1.6 Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat .	22
2.2 Lembaga Baitul Mal	30
2.2.1 Pengertian Lembaga Baitul Mal.....	30
2.2.2 Pendistribusian Zakat	36
2.3 Dana Pendidikan	41
2.3.1 Pengertian Beasiswa	41
2.3.2 Tujuan Beasiswa	43
2.3.2 Karakteristik Beasiswa	43

2.4 Penelitian Terkait	44
2.5 Kerangka Berpikir.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Desain Penelitian	61
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	62
3.3 Sumber Data.....	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5 Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	72
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	72
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	73
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	73
4.1.4 Perkembangan Baitul Mal Aceh.....	77
4.2 Hasil Penelitian	78
4.2.1 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Basiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh	78
4.2.2 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Basiswa Satu Keluarga Sarjana.....	87
BAB V PENUTUP	97
7.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

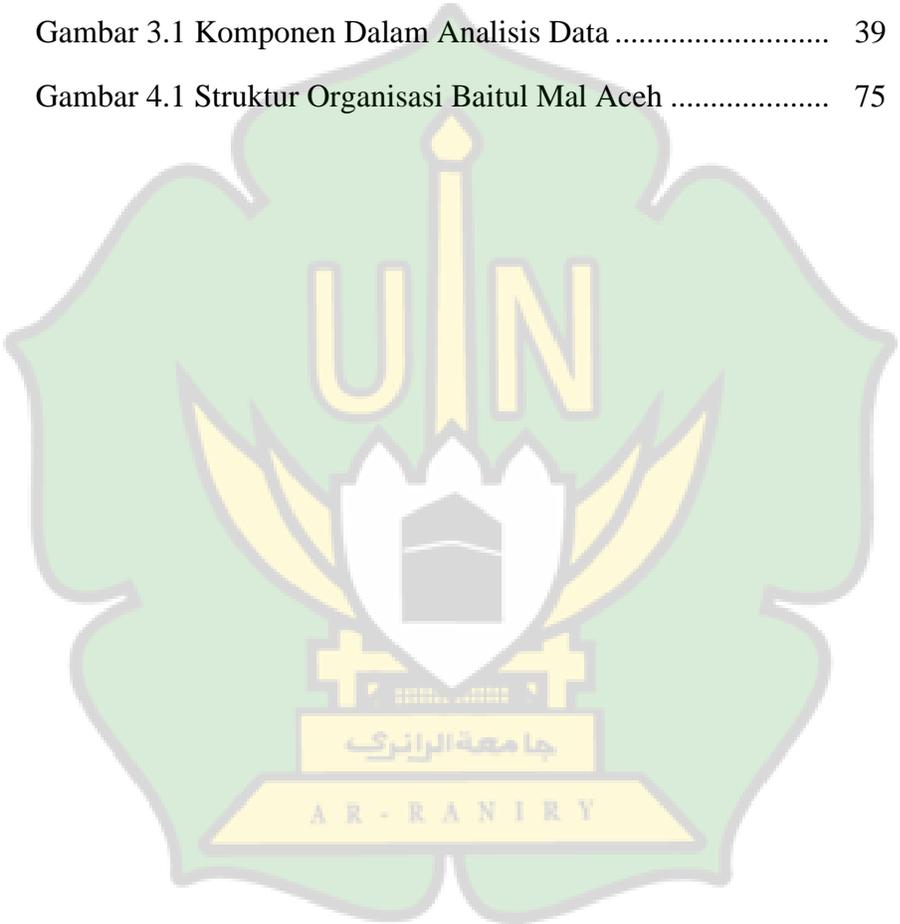
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mustahik penerima Beasiswa.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terkait	29
Tabel 3.1	Narasumber Penelitian	35
Tabel 4.1	Satuan Besaran Biaya Penyaluran Beasiswa SKSS Tahun 2022	51
Tabel 4.2	Daftar Rincian SDM Pada Program Beasiswa SKSS	57
Tabel 4.3	Pengelompokkan Sumber Daya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui beasiswa SKSS	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mustahik Penerima Beasiswa.....	31
Gambar 2.1 Penelitian Terkait.....	31
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia selalu menjadi persoalan yang sering diperbincangkan, dikarenakan angkanya yang terus meningkat. Khususnya di Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Aceh meningkat 0,20 persen atau 16 ribu orang sejak Maret 2021 hingga September 2021 menjadi 15,53 persen. Secara total, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850 ribu orang. Peningkatan orang miskin menambah rekor Panjang Aceh menjadi provinsi termiskin di pulau Sumatera. Aceh juga masuk dalam lima provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Kondisi ini tentunya memerlukan sentuhan dan perhatian yang besar dari pemerintah karena membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat (CNN Indonesia, 2021).

Pemerintah senantiasa dituntut untuk mengambil peran yang besar dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Maka, peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin harus dilakukan dengan upaya mencari alternatif-alternatif, penyusunan program, dan pengambilan keputusan yang optimal. Sebab tidaklah mudah mencari peluang di era global sekarang apalagi masyarakat pedesaan yang ekonominya rendah dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ditangguhkan barang sehari saja karena menyangkut keberlangsungan hari berikutnya.

Pemerintah Daerah khususnya di Aceh telah melakukan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, baik itu mencakup pemberdayaan dibidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun Pendidikan. Salah satunya yaitu melalui Baitul Mal yang menjadikan zakat sebagai pemanfaatan dana, khususnya dalam menghilangkan kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan Lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan harta keagamaan lainnya dari masyarakat untuk kesejahteraan umat. Keberadaan Baitul Mal tingkat Provinsi ini telah dimulai sejak April Tahun 1973. Awalnya Pemerintahan Daerah istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 Lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubahlah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA). Kemudian setelah disahkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2000 terkait penyelenggaraan syariat islam, dibentuklah Badan Baitul Mal di Aceh Tahun 2003, dengan diperkuat dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, maka terbentuklah

Lembaga Amil zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh (BMA) sampai sekarang (baitulmal.acehprov.go.id, 2022).

BMA memiliki komitmen yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program kerja berdasarkan Dokumen keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2021 dan Nomor 01/KPTS/2021 tentang alokasi penyaluran zakat BMA tahun 2021, terdapat 38 program kerja penyaluran zakat tahun 2021 dimana 14 program diantaranya merupakan program pendidikan. Program pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan memberikan bantuan Pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu (baitulmal.acehprov.go.id, 2022).

Program sektor pendidikan ini telah mendapatkan penyaluran anggaran zakat lebih dari Rp.25 Milyar. Dari sumber dana tersebut BMA mendistribusikannya melalui empat belas program beasiswa dan bantuan dana pendidikan, seperti : beasiswa penuh bagi anak Muallaf jenjang SMP/MTS DAN SMA/MA, beasiswa penuh bagi anak Muallaf jenjang sarjana (DIII/s1), beasiswa berkelanjutan bagi anak Muallaf jenjang SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA beasiswa penuh tahfidz Al-qur'an jenjang SMP/ MTs dan SMA/MA, beasiswa penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), beasiswa penuh bagi siswa/santri, beasiswa penuh vokasi, beasiswa berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus, beasiswa berkelanjutan bagi siswa/santri berprestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, beasiswa berkelanjutan

bagi Santri Tahfidh Alqur'an, beasiswa berkelanjutan Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dan D3/S1, bantuan dana untuk program Ta'lim Hafiz 30 Juz, bantuan dana pendidikan bagi santri dan bantuan dana untuk penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa D3/S1 (Baitul Mal Aceh, 2022).

Dari data diatas, seharusnya mampu memberdayakan lebih banyak masyarakat miskin yang kekurangan dana dalam membiayai pendidikannya. Tapi, nyatanya masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya, karena ekonomi yang rendah dan tidak menghasilkan pendapatan, sementara pendidikan sangat penting guna membangun potensi untuk kehidupan yang lebih berkualitas (Acehtrend.com, 2022).

Jadi, dengan adanya program beasiswa dan bantuan dana pendidikan ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dan menyalurkan dana zakat dengan baik, tepat sasaran dan merata, sehingga masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata merasa sangat dibantu dan tidak adanya kesenjangan pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

Dari program- program pendidikan yang ada tersebut, fokus peneliti yaitu program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Program beasiswa ini merupakan program baru yang ada sejak tahun 2016, berupa beasiswa penuh yang diberikan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas dari keluarga miskin untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi di institusi pendidikan yang bermutu,

sebagai wujud perhatian dan dorongan untuk meningkatkan pembangunan dimasa yang akan datang melalui generasi muda Aceh (Baitul malAceh, 2022).

Dalam hal penyaluran beasiswa SKS ini, BMA bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Aceh Syariah. Sejak tahun 2016 Bank Aceh Syariah telah menjadi partner dalam transaksi, penyetoran zakat, serta menyalurkan beasiswa dan dana pendidikan tersebut dari dana zakat kepada masyarakat miskin atau penerima beasiswa (Baitul Mal Aceh, 2022).

Jumlah mustahik penerima manfaat program ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Mustahik Penerima Beasiswa SKSS (Periode 2016-2020)

NO	PERGURUAN TINGGI	TAHUN PROGRAM					TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Universitas Syiah Kuala	39	7	10	19	27	102
2	UIN Ar-raniry	44	10	10	21	47	132
3	STAI Tgk. Chik Pante Kulu	0	0	0	0	20	20
JUMLAH		83	17	20	40	94	254

Sumber data : Laporan penyaluran Zakat sektor Pendidikan Sekretariat Baitul Mal Aceh 2021

Dari Tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa pada tahun pertama BMA memberikan beasiswa kepada 83 Mahasiswa yaitu t 39

mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan 44 mahasiswa dari UIN Ar-raniry. Pada tahun 2017 adanya penurunan jumlah penerima beasiswa dari tahun pertama hanya sebanyak 17 mahasiswa dengan rincian untuk USK 7 mahasiswa dan UIN Ar-raniry 10 mahasiswa. Selanjutnya, pada tahun 2018 ada 20 mahasiswa yang menerima beasiswa, yaitu masing-masing untuk UIN Ar-raniry dan USK 10 Mahasiswa. Pada tahun 2019 ada 40 mahasiswa yang menerima beasiswa yaitu 19 mahasiswa dari USK dan 21 mahasiswa dari UIN. Di tahun 2020 BMA mulai memperluas penyaluran beasiswa bukan di USK dan UIN Ar-raniry saja, tapi juga di STAI Tgk. Chik Pante Kulu. Dengan rincian 27 mahasiswa USK, 47 mahasiswa UIN Ar-raniry dan 20 Mahasiswa dari STAI Tgk. Chik Pante Kulu.

Pada tahun 2021 pihak BMA mencoba memperbaiki sistem serta mengevaluasi dampak dari beasiswa ini, al hasil tidak ada penerimaan beasiswa untuk mahasiswa baru hanya melanjutkan kuota yang masih ada, karena faktor internal yang masih lemah serta pendampingan yang belum optimal (wawancara 01, 13 September 2022).

Pada tahun 2022, pihak BMA belum juga membuka kuota baru untuk penerima beasiswa tersebut dikarenakan masih proses evaluasi. Maka dari itu, diharapkan bagi pihak BMA untuk mengoptimalkan monitoring serta evaluasi agar program ini dapat terus disalurkan. upaya penyaluran beasiswa tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat dengan profesional

dan tanggung jawab agar tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu mampu memberdayakan masyarakat sehingga terciptanya lebih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya dan berkompeten serta dapat meminimalisasi angka kemiskinan khususnya di Aceh.

Dari latar belakang permasalahan, penulis tertarik mengangkat Skripsi dengan judul : **“Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat Teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh dalam menambah referensi dan kajian bagi mahasiswa/i dan juga sebagai bahan penunjang bagi penelitian yang telah ada.

Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi BMA untuk terus berkembang dan meningkatkan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada BMA.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan serta pengalaman mengenai bagaimana optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Program

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada BMA serta sebagai syarat diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

b) Bagi Mustahiq

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan atau perantara bagi Mustahiq untuk menyampaikan harapannya kepada BMA khususnya dalam Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada BMA.

c) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan awal kajian ilmu, dan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi Mahasiswa/i, khususnya terkait Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada BMA.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, maka Pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan bagaimana kerangka teori yang relevan terhadap topik dikaji yaitu Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada BMA

BAB III METODE PENELITIAN

Menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup daripada jenis penelitian yang digunakan, objek dan subjek, sumber data yang digunakan, dan Teknik pengumpulan data, jenis data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan

BAB V PENUTUP

Menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran pada penelitian yang dilakukan

Pada bagian akhir, penulis masukkan daftar pustaka sebagai referensi dalam penelitian ... skripsi ini besertalampiran-lampirandandataridayathiduppenulis. جا

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Teori Optimalisasi

Adapun beberapa pengertian optimalisasi menurut para ahli sebagai berikut:

Optimalisasi adalah hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Optimalisasi juga banyak diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Dalam hal ini adalah menjadikan BMA terlaksana dengan semestinya seperti tujuan yang telah ditentukan. Yakni mampu mengelola dan menyalurkan zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Optimalisasi berasal dari kata dasar “ optimal” yang bermakna terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, tindakan mengoptimalkan (menjadikan yang paling baik, paling tinggikan sebagainya) sehingga optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk menjadikan sesuatu (sebagai suatu

desain, sistem atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.

Menurut Poerdwadarminta (2014), optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, dalam optimalisasi memerlukan adanya tindakan yang nyata, baik itu berupa cara, proses atau yang lainnya sehingga lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan suatu harapan.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Sidik, 2001).

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tersebut harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau meraih sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

Pengambilan keputusan memiliki makna yang penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita aspirasi dan pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan.

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Bastian (2006:275) yang bahwasanya optimalisasi dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi terhadap input yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi,

Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan dibanding *input* yang digunakan.

Input yaitu asal data digunakan agar mengimplementasikan strategi dan fungsi program. Sedangkan output adalah hasil yang didapat dari aktivitas, program serta kebijakan.

Pada penelitian ini peneliti menguraikan efisiensi dengan dengan menggunakan indikator realisasi, inovasi, manajemen sumber daya manusia serta dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS tersebut.

2. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan terget yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika suatu instansi atau organisasi atau instansi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi atau instansi tersebut telah beroperasi secara efektif.

Pada penelitian ini penulis menguraikan efektivitas dengan menggunakan indikator tujuan dan target peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS.

3. Ekonomis.

Ekonomi merupakan interaksi dari pasar juga input pada barang juga bisa diperoleh dengan standar kualitas dari apa yang dicari dengan harganya yang terjangkau.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji ekonomis dengan menggunakan indikator sarana dan prasarana dan sumber

daya dalam pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS.

2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Sudarsono, 2013).

Pemberdayaan atau pemberkuasaan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris empowerment, berasal dari kata “power” yang berarti kekuatan berbuat, meraih, melakukan atau memungkinkan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas (Baridi, Zein, Hudri, 2022). Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti, pemberdayaan itu membangun kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat untuk menjadi lebih berdaya (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan menimamisasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat.

dengan kata lain, menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota individu anggota masyarakat tetapi juga pranat-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan (Sulistiati, 2004).

Memberdayakan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada situasi sekarang yang tidak mampu untuk keluar dari ranjau kemiskinan dan keterbelakangan. Maka, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kapasitas dan kemampuan dalam a) mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom). Dalam arti bukan saja bebas mengutarakan opini melainkan bebas dari kelaparan, selamat dari kebodohan, terhindar dari kesusahan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan c) pada pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi, mereka ikut andil didalamnya (Edi, 2010).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah rancangan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini melukiskan

paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered*, *partipatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Yakni mendorong dan membangun kesadaran masyarakat untuk mengembangkan, memperkuat potensi yang dimiliki dan menjadikannya tindakan nyata melalui program khusus serta melindungi dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar usaha untuk mencukupi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (Chambers, 1995).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan dan berbagai upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang lemah dan rentan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, intelektual, dan lainnya.

2.1.3 Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka ini upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, menghadirkan kondisi atau susana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam arti setiap masyarakat itu mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan, bukan sama sekali tanpa daya. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan bentuk upaya dalam membangun daya itu melalui dorongan dan motivasi.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Langkah-langkah yang efektif tentu diperlukan dalam

proses tersebut. Seperti halnya menyediakan berbagai input, menghadirkan langkah-langkah nyata, dan memberi akses kedalam berbagai peluang yang menjadikan masyarakat semakin berdaya, serta menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. *Ketiga*, melindungi masyarakat yang lemah dengan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Dalam arti mencegah yang lemah bertambah lemah. tetapi bukan membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap berbagai pemberian (*charity*). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan meningkatkan potensi untuk kualitas hidup yang lebih baik secara berkesinambungan (Soemodiningrat, 2002).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan semaksimal mungkin dalam meningkatkan ekonomi dan taraf kehidupannya agar lebih baik, khususnya bagi orang-orang yang rentan dan lemah yang membutuhkan dorongan dan motivasi.

2.1.4 Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat

Untuk tercapainya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa elemen yang terkait, (Eko, 2002) misalnya:

1. Peranan pemerintah. dalam artian birokrasi pemerintah harus mampu menyesuaikan dengan misi tersebut, yaitu mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan

masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan yang memihak golongan bawah untuk dapat memberdayakan masyarakat.

2. organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadya Masyarakat, baik itu organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal.
3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan dalam masyarakat itu sendiri, seperti BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
4. Koperasi, sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berdimensi ekonomi dan bentuk bangunan usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
5. Pendamping, diperlukan karena masyarakat miskin mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.
6. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom up*.
7. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

Karena itu, dalam upaya pemberdayaan masyarakat amat sangat dibutuhkan elemen-elemen yang terlibat, serta adanya hubungan kemitraan dan jaringan antar elemen yang menjadikan proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan guna untuk kesejahteraan masyarakat, karena

kemiskinan menjadi tanggung jawab Bersama sehingga upaya penanggulangannya menuntut keikutsertaan aktif semua pihak (Sumadiningrat,1993).

2.1.5 Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar pengembangan masyarakat”, bahwa tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pemberdayaan tidak serta merta terwujud atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, melainkan melalui beberapa proses tahapan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (agent of change) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. sdangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2. Tahapan assessment

Proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penelitian ini dapat pula digunakan Teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahapan pemformulasikan rencana aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar warga (masyarakat).

6. Tahapan evaluasi

Sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7. Tahapan Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

2.1.6 Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna, yaitu *al barakatu* “ keberkahan ”, *al namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath thaharatu* “kesucian”, dan *ash shalahu* “keberesan (kebaikan). Penjelasan arti tersebut mengarah pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Shidieqy, 2001).

Ditinjau dari istilah zakat adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. wajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula (Rosyadi, 2003).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam yang mampu atau sudah mencapai nisab dan haul. Selain merupakan salah satu rukun islam, zakat juga diperintahkan dalam Alqur'an. Kewajiban membayar zakat disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 30 kali. Salah satunya adalah dalam Surah Al-baqarah ayat 43 yang berbunyi :

الرَّكْعَيْنِ مَعَ وَأَزْكِعُوا الرِّكَوَةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : “ *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* “. (Q.S. Al- Baqarah:43)

Seperti halnya ayat diatas, Seringkali perintah zakat disandingkan dengan perintah menunaikan shalat. Shalat dalam arti sebagai hubungan antara manusia dengan Allah (hablum min Allah). Maknanya, shalat untuk membentuk keshalehan seorang muslim secara pribadi. Sedangkan zakat diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (hablum min annas). Artinya, zakat bukan hanya membentuk keshalehan secara pribadi tapi juga sosial.

Maka dari itu, disebut salah satu dari maksud risalah islam diturunkan. Zakat adalah rukun h rukun ysg yang mana zakat inilah merupakan salah satu dari maksud diturunkannya risalah islam kepada seluruh umat manusia. Zakat merupakan rukun yang kelihatan jelas berisi unsur kemasyarakatan dibandingkan semua rukun islam. yang paling yang mengandung nilai kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun islam, karena di dalamnya terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada Pundak individunya.

Zakat merupakan pranata sosial keagamaan yang mempunyai hubungan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah kemanusiaan. Seperti halnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan kekayaan. Pengelolaan potensi zakat secara profesional dan bertanggung jawab akan mempersempit jurang perbedaan ekonomi ke batas seminimal

mungkin, menghapuskan kemiskinan dan mertakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga diharapkan tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita akibat kemiskinan, sedangkan sebagian orang atau kelompok lainnya hidup dalam kemewahan dan kemakmuran.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghnia (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan tempo waktu 12 bulan (haul). Yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset Lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan masyarakat (umat). Oleh karena itu, Alqur'an memberikan rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerimanya) (Mahmud, 2006).

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertumbuhan Angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja disektor formal yang berakibat bertambahnya Angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun yang setengah menganggur atau bekerja dibawah jam kerja normal (under employment) (Hamid dan Anto, 2000).

Zakat merupakan sumber potensial, untuk memberantas kemiskinan, bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat islam dalam mengentaskan kemiskinan (Jasafat, 2015:1). Zakat bisa difungsikan untuk modal kerja bagi orang miskin sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Zakat juga bisa difungsikan untuk tambahan modal bagi masyarakat yang kekurangan modal, sehingga usaha yang dia jalani dapat berjalan lancar sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. (Rahmalia, 2016). Dengan demikian beban negara berkurang dalam masalah pengangguran dan kemiskinan (Rozalinda, 2014a :27).

Secara riil, zakat menekan tingkat pengangguran dapat dilihat pada dua keadaan; (a) implementasi zakat memerlukan

tenaga kerja dalam pengelolaannya. (b) perubahan mustahik yang pada dasarnya tidak mempunyai akses pada ekonomi menjadi lebih baik secara ekonomi, yang mana dapat meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja (Sakti:2007:188).

Jika dianalisa lebih luas, zakat bisa dijadikan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam perekonomian agar tidak terpuruk saat kemampuan konsumsi mengalami *stagnasi*. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum akibat penjaminan konsumsi dasar oleh negara, sehingga zakat sangat signifikan perannya dalam perekonomian sebagai wujud pemberdayaan (Rozalinda, 2014b:272).

Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, zakat merupakan instrumen yang memiliki peran yang berbeda dari sumber keuangan dan instrument pemberdayaan lainnya. Yakni, zakat mempunyai peran yang strategis, yang mana zakat hanya memiliki dampak baik berupa ridha dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui :

1. Zakat merupakan salah satu panggilan agama. Ia merupakan cerminan keimanan seseorang. Maka dari itu, sudah bisa dipastikan banyak masyarakat yang akan memenuhi panggilan tersebut dengan membayar zakat.
2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.
Artinya, seorang muslim akan tetap memenuhi kewajiban

zakatnya terus-menerus dan orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis.

3. Zakat secara empiris mampu menghilangkan kesenjangan sosial dan sebaliknya bisa menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan (Saifuddin, 2013).

Jadi, Dari nilai strategis tersebut, terdapat Beberapa signifikansi dalam membangun ekonomi dan pemberdayaan umat, antara lain: (utomo 2009:17)

1. Zakat sebagai ibadah wajib dengan ketentuan yang telah ditetapkan Syariah dalam, dalam QS. At-taubah :60
2. Zakat sebagai wadah dalam mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebihan dengan mereka yang membutuhkan.
3. Zakat sebagai pemberian yang akan membantu kehidupan ekonomi yang lemah dan akan dapat menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif.
4. Zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan program-program pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan negara.
5. Zakat dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, dengan kesadaran tersebut dapat membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.

6. Zakat dapat digunakan untuk menjalankan program-program produktif yang dapat mengubah taraf ekonomi seseorang menjadi lebih baik.

Menurut ulama Fiqh Kontemporer salah satu diantaranya adalah Al-Qardhawi, memberikan penjelasan bahwa zakat merupakan salah satu instrument pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan dan paling efektif . Meskipun masih banyak kendala yang dialami dalam pelaksanaannya. Peranan zakat bukan hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Atabik, 2015:340-361).

Pemberdayaan masyarakat dalam Pengentasan kemiskinan melalui proses yang Panjang mampu ditempuh melalui pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan mental). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor terpenting pengentasan kemiskinan dikalangan umat islam, khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan system pengelolaannya

melalui instituti amil zakat yang proporsional dan professional (Qadir, 2001:210-224).

Oleh karena itu, pengumpulan dan penyaluran zakat ini perlu adanya keikutsertaan serta tanggung jawab yang besar dari Lembaga amil zakat atau Baitul mal, agar pengelolaannya berjalan lebih baik dan semestinya. Seperti halnya Baitul mal sendiri melakukan pengelolaan zakat atas berbagai bentuk program pendayagunaan.

Pengelolaan zakat berbasis masyarakat sudah ada bahkan sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang membayar zakat langsung ke mustahik, pemuka agama, masjid dan pesantren. Hingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 (UU) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan pasal 7 Bab 3 mengatur bahwa Badan Pengelola zakat di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil zakat didirikan oleh pemerintah sementara Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Nangimah, 2018).

Khususnya di provinsi Aceh, pembentukan Lembaga Pengelola Zakat telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pada saat disahkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dengan diperkuat dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, maka terbentuklah Lembaga Amil zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini (baitulmal.acehprov.go.id, 2022).

2.2 Lembaga Baitul Mal

2.2.1 Pengertian Lembaga Baitul Mal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha. Sedangkan Baitul Mal berasal dari Bahasa Arab “*bait*” yang berarti “rumah” dan “*al mal*” yang berarti “harta”. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. (dahlan, 1999). Sedangkan secara istilah Baitul Mal adalah suatu Lembaga atau pihak yang mempunyai wewenang khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’. Baitul mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983).

Secara istilah, kata Baitul Mal tidak terdapat dalam nash syariah. Syariah telah memberikan ketentuan tentang harta negara, dan pos pembelanjaan negara, pos sumber penghasilan negara, dan pos pembelanjaan negara itu. Syariah telah menetapkan harta-harta yang menjadi hak kaum muslim sekaligus menetapkan pembelanjaan yang menjadi kewajiban negara dan hak bagi semua muslim. Semua harta tidak lain adalah harta kaum muslimin, merupakan pernyataan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum muslimin. Baitul

Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara sudah mulai dipraktikkan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW. (Huda, 2012).

Pada masa Rasulullah SAW, awalnya harta-harta kaum muslimin berupa zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya itu dikumpulkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S At-taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S At-taubah:103)

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah, zakat atau harta agama lainnya. Yusuf Qardhawi menjelaskan, menurutnya ayat tersebut merupakan dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantara ‘amil, yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah bukan pribadi-pribadi. Kemudian dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang

yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 1993).

Selain dalam Al-qur'an, perintah zakat juga terdapat dalam hadits. Antara lain yaitu sabda nabi Muhammad SAW. Ketika memerintahkan pada Mu'adz ke Yaman:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَوَلِيَّةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radhiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka" (hadis.id, 2022)

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW. dan Abu Bakar merupakan sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, nabi sendiri selain menempatkan dirinya sebagai *'amil*, juga pernah mengangkat orang lain sebagai *'amil*, seperti hadist diatas salah satunya yaitu Mu'adz bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam terkemuka yang oleh nabi dijadikan sebagai salah seorang *'amilin* di daerah Yaman. Pengangkatan *'amil* ini selanjutnya dipahami oleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakat dari pemerintah pusat (Nabi SAW. di Madinah) kepada Mu'adz yang ada diperintah daerah (Yaman). Maka dari itu, pada masa Rasulullah zakat sudah dikelola penuh oleh negara (Kementerian Agama RI, 2015).

Lima belas abad yang lalu tidak ada konsep yang pasti mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara, badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangannya. Negara islam berasaskan kepercayaan. Ciri penting yang tercantum dalam Alquran dilakukan Rasulullah SAW. dengan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebagai seorang yang diyakini dan diamanahkan untuk mengatur urusan negara dengan semangat yang sama. Rasulullah SAW. Pada abad ketujuh Merupakan pimpinan negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan lebih dulu dan kemudian dikeluarkan sesuai

kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik perseorangan. Walau demikian para pemimpin negara dan gubernur mampu menggunakannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Tempat pengumpulan itu disebut Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Semasa Rasulullah hidup, Mesjid Nabawi dipakai sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Mal terletak disitu. Tetapi, hewan-hewan tidak bisa disimpan di Baitul Mal sesuai dengan alamnya, hewan tersebut ditempatkan dipadang terbuka seperti diceritakan dalam riwayat berikut “ beberapa orang dari suku Uraina datang ke Madinah dan mereka tidak nyaman dengan iklimnya. Rasulullah mengizinkan mereka untuk pergi ketempat penggembalaan unta. (hasil zakat) dan disana mereka minum susu unta serta menggunakan air seni unta sebagai obat, tapi malah setelah itu mereka membunuh penggembalanya dan membawa pergi unta-unta tersebut. Rasulullah pun mengirimkan orang untuk menangkapnya dan mereka pun dibawa kehadapannya” (Karim, 2002).

Baitul Mal merupakan suatu Lembaga khusus atau pihak yang memiliki tugas khusus mengurus segala harta umat, baik berupa penghasilan maupun pengeluaran negara. Harta tersebut menjadi hak Baitul Mal dikarenakan tidak ditentukannya individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang layak menerimanya. Baik harta tersebut berupa tanah, bangunan, barang tambang uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya yang boleh

dimiliki sesuai hukum syara', dan juga baik itu yang sudah pasti masuk kedalam tempat penyimpanan Baitul Mal ataupun yang belum (Nafran, 2014a).

Dana yang terkumpul di Baitul Mal dikelola dengan profesional oleh pengelola (amil) Baitul Mal pada zaman rasul hingga masa *khulafaurrasyidin*, mempunyai peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tergambarlah pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib ra., bahwa Baitul mal melakukan pengamatan terhadap moneter, dan menjadi Lembaga yang mengelola fiskal negara (Nafran, 2014b).

Menurut ensiklopedia hukum islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara) (Syamruddin, 2007).

Suhrawardi, K lubis, menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu Lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berekenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

Baitul mal merupakan Lembaga amil zakat yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Seperti fakir miskin, anak yatim dan lainnya.

Menurut Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah :

1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Jadi, Baitul Mal adalah Lembaga atau instansi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Pendistribusian Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang yang atau pihak lain. Kata penyaluran atau pendistribusian itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Secara terminology, penyaluran adalah pembagian, pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya (W.H.S Poerwardaminta, 2010).

Ada juga yang menyebutkan arti distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses

penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi.

Menurut Meity (2011), pendistribusian adalah penyaluran/pembagian /pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada banyak orang atau beberapa tempat. Maka dari itu, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif. Didalam Surah At-Taubah ayat 90 dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana* “.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (asnaf). Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak untuk dimerdekakan, gharimin atau orang yang berhutang , fi sabilillah dan terakhir ibnu sabil. Maka dari itu zakat harus disalurkan kepada orang individu yang layak menerimanya.

Maka dari itu, ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, Baitul mal wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun disuatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut pula. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW. Pada saat mengurus Mu'adz bin Jabak ke Yaman dan memberi tugas untuk mengumpulkan zakat dari penduduk setempat.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi islam yang terlahir dari Q.S. Al-Hasyr (59) :7 sebagai berikut:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : “ Agar harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya dikalangan kamu”.

Prinsip tersebut yakni larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam islam, dan larangan menumpuk harta.

Sejalan dengan prinsip syari'ah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai

dengan syari'at islam, dan pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memerhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama telah sepakat bahwa fakir dan msikin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan utama lembaga pengelola zakat adalah mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dikalangan umat islam (Hafidhuddin, 2013).

Pemberian zakat kepada mustahik, secara konsumtif maupun secara produktif harus dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui kondisi dari mustahik tersebut para amil zakat harus memastikan kelayakan para mustahik. Apakah mereka dapat dikategorikan mustahik konsumtif atau produktif. Para amail zakat perlu menganalisis hal tersebut. Sehingga zakat benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.

Pendistribusian zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial, mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada konsumtif seperti ketentuan yang telah tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang pengeloalan zakat. Dalam pelaksanaannya, model

pendayagunaan zakat dan penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik (Nisa, 2016).

Bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia tentu zakat telah banyak memberi manfaat, baik itu manfaat sosial maupun ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menjauhkan dari sifat-sifat yang negatif serta menciptakan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Adapun secara ekonomis manfaat zakat adalah pemerataan pendapatan masyarakat, membantu pembangunan fasilitas dakwah islam serta membangun kemandirian fakir miskin. Alangkah besarnya manfaat zakat bagi masyarakat. Manfaat tersebut akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta Amil Zakat, dikarenakan keberadaan Baitul Mal akan pemeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara perorangan.

Zakat yang telah dikumpulkan dapat didistribusikan dan dikelola kepada zakat konsumtif dan zakat produktif. Dimana zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan secara wajar. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Haris, 2015).

2.3 Dana Pendidikan

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah (Supriyadi, 2006: 3). Menurut Mulyasa (2005:47) “keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan.

Dana pendidikan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga atau perseorangan dalam bentuk dana kepada yang membutuhkan guna keberlangsungan Pendidikan yang lebih baik. Dan juga berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018, dana pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Maka dari itu, dana pendidikan sangatlah penting guna keberlanjutan pendidikan yang lebih baik.

2.3.1 Pengertian Beasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Dalam arti beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada

perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlanjutan pendidikan yang dijalannya, dan beasiswa juga diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar mampu meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan (Murniasih, 2009).

Beasiswa pada dasarnya merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena beasiswa juga dapat diartikan sebagai penambahan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Karena beasiswa juga dapat diartikan sebagai penambahan kemampuan ekonomis bagi penerimanya, maka beasiswa juga merupakan penghasilan.

Dalam arti yang lebih luas, beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh Pemerintah, perusahaan, Yayasan, Lembaga atau donator luar yang mempunyai kepedulian bagi mahasiswa yang berprestasi atau kurang mampu.

2.3.2 Tujuan Beasiswa

Beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa bertujuan untuk beberapa hal diantaranya :

1. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi dan peran di tengah-tengah peraturan global.
2. Menjalankan demokratisasi dan keadilan dalam bidang Pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.
3. Memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang mengalami hambatan secara ekonomis dan atau geografis.

Pemberian beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa yang tepat sasaran akan memberikan pemerataan agar bisa mencapai prestasi akademik yang lebih baik meskipun secara ekonomi sedikit mengalami hambatan. Pemberian beasiswa berupaya memberikan dorongan bagi pelajar dan mahasiswa untuk tetap menjaga kelanjutan studi dan berprestasi. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar sudah pasti memiliki konsekuensi yang perlu dijalani pelajar dan mahasiswa.

2.3.2 Karakteristik Beasiswa

Menurut Erny Murniasih (2011), Dilihat dari sisi pendanaannya, karakteristik beasiswa ada dua, yaitu :

1. Beasiswa Penuh. Yakni, jenis pendanaan yang mencakup seluruh komponen Pendidikan. Biaya tersebut antara lain biaya perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya penelitian, tiket perjalanan dan fasilitas lainnya.

2. Beasiswa sebagian , yaitu jenis pendanaan yang tidak mencakup seluruh komponen Pendidikan, beasiswa jenis ini hanya memberikan benefit pembebasan perkuliahan saja sehingga penerima beasiswa harus menyiapkan biaya tambahan seperti biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya hidup.

Di Indonesia beasiswa sangatlah penting bagi Pendidikan karena membantu pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai Pendidikan sehingga masyarakat tersebut bisa melanjutkan Pendidikannya dengan baik. Maka dari itu dengan beasiswa tersebut dapat menghasilkan generasi-generasi intelektual yang akan menjadi penerus bangsa.

Beasiswa di Aceh mengalami kemajuan yang signifikan, ini dikarenakan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah dan badan hukum lainnya dalam hal bantuan modal, misalnya seperti Baitul Mal Aceh yang membantu pemberdayaan masyarakat dibidang Pendidikan sebagai penunjang intelektual dan kemakmuran masyarakat.

2.4 Penelitian Terkait

Berdasarkan hasil penelusuran penulis selama ini tentang berbagai karya ilmiah lain yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang bisa dijadikan bahan referensi dan perbandingan, baik mengenai persamaan atau perbedaannya untuk memperoleh

landasan teori ilmiah serta membantu menyelesaikan proposal ini. Penelitian terdahulu itu diantaranya yaitu:

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, Renaldy Trisna Erlangga (2021) dengan tema “ Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat “. Yang bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari jurnal, internet, buku atau pustaka lainnya dengan menggunakan Teknik pengamatan, penelaahan dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia zakat amat penting dikelola oleh pemerintah, selain merupakan salah satu rukun islam, dan perintah yang diwajibkan dalam Alqur’an. Zakat sangat berpotensi untuk peningkatan usaha-usaha dalam menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik dan amanah. Maka dari itu, Zakat tidak hanya ibadah yang dinikmati individual namun juga berdampak dalam kehidupan sosial. Karena itulah mengapa perlu dibutuhkan kekuasaan oleh pemerintahan dalam pengelolaan zakat agar berjalan dengan maksimal. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penelitian

kualitatif metode deskriptif. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat dimana cakupan Lembaga zakat yang diteliti lebih luas dan umum yang ada di Indonesia. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada satu Lembaga zakat yaitu Baitul Mal Aceh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Benney Maburr Aurora dan Firdaus (2019), dengan judul “ Baitul Mal dan Pemberdayaan masyarakat (studi terhadap dampak program Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah)”. Yang bertujuan untuk mengetahui program-program pemberdayaan dan mengetahui pandangan publik tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan Baitul Mal sehingga program tersebut memiliki dampak pada masyarakat yang diberdayakan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah sumber data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal berperan aktif dalam membantu perekonomian miskin. Komunitas yang diberdayakan masih dapat diberikan keterampilan dan modal usaha hingga mereka dapat menjadi pembayar pajak bagi komunitas miskin lainnya. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait Pemberdayaan

masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui semua program yang ada serta Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan peneliti berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui satu program serta Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Aceh.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhlisin dan Agung Suprojo (2017), dengan judul “Optimalisasi pemberdayaan masyarakat pada program pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan“. Penelitian ini dilakukan dikantor BAPPEDA unit kesehatan dan kesejahteraan sosial Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui optimal pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, faktor pendukung dan faktor penahannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu kualitatif dengan Teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, optimalisasi pemberdayaan pada program pembangunan dan Pendidikan Kabupaten Sampang melalui penguatan visi Bupati guna

memenuhi kebutuhan fasilitas Pendidikan, sebagai sarana pendukung terhadap Pendidikan formal dan non formal yang memerlukan partisipasi masyarakat. Kedua, faktor pendukung yaitu kebijakan pemerintah melalui visi Bupati yang diterapkan pada pemerintah BAPPEDA secara Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, faktor penghambatnya adalah minimnya tenaga belajar yang profesional sehingga pembangunan Pendidikan dan pengembangan SDM tidak produktif, Dualisme model penanganan Pendidikan yang berada dibawah naungan Diknas dan dibawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG) membuat tidak optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan perencanaan serta fasilitas belum terbangun secara merata sehingga menjadi hambatan proses belajar mengajar. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait optimalisasi pemberdayaan masyarakat dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif, analisis datanya dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan serta Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya terdapat pada Lembaga yang diteliti adalah BAPPEDA Unit kesehatan dan kesejahteraan sosial Kabupaten Sampang, sedangkan peneliti Lembaga yang diteliti adalah Baitul Mal Aceh.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Maulana, Asep Ramdan Hidayat dan Zaini Abdul Malik (2016), dengan tema “ Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung “. Yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode deskriptif . Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung dilakukan pada program Swadesi sebagai penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa, program prospek dan Bina Ternak Qurban sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usha, dan peembelajaan peralatan operasional bagi para amilin yang bekerja di PKPU Kota Bandung. Dan optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bnadung sudah baik. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada Lembaga yang diteliti yaitu PKPU Kota Bandung, sedang peneliti Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Aceh.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Safri Miradj dan Sumarno (2014), dengan tema “ Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Non Formal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dikabupaten Halmahera Barat “. Yang bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan non formal dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses pemberdayaan yang dilakukan dilembaga Pendidikan non formal belum sesuai harapan belajar warga yang belajar terlibat dalam proses tersebut, hasil yang ditimbulkan pasca mengikuti proses pemberdayaan belum membantu masyarakat miskin meningkatkan kehidupannya serta hubungan kerja sama yang dibangun oleh PBKM Merpati, PBKM Mario Laha, Orsos Tunas Harapan, Orsos Melati, dan LPM Sonyinga haanya sebatas Pemerintahan Daerah. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif . Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait Lokasi yang diteliti yaitu kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan peneliti Lokasi yang dituju yaitu Kantor Baitul Mal Aceh.

6. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alvian Ahmad Rizki (2019), dengan tema “Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh”. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dan pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam proses penyaluran zakat berbentuk beasiswa SKSS di Baitul Mal Aceh dalam pencairan dana untuk seluruh program yang ada haruslah menunggu persetujuan dari anggota legislatif dan ini berbanding terbalik dengan peraturan Pasal 10 peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang tata cara penerimaan dan pencairan dana zakat dimana dalam isi peraturan tersebut pihak Baitul Mal bisa mencairkan dana tanpa harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif dan pemanfaatan zakat terbagi kedalam dua poin yang pertama adalah pemanfaatan zakat secara sosial dimana program SKSS ini tidaklah hanya bersifat material tapi juga bersifat moral. Yang kedua secara ekonomis zakat yang diterima oleh mahasiswa dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait program beasiswa SKSS pada Baitul Mal Aceh dengan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan

penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait proses penyaluran dan pemanfaatan dana zakat melalui beasiswa SKSS. Sedangkan peneliti fokus penelitian yaitu mekanisme dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS (Kajian pada Baitul Mal Aceh).

7. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Sulfi Rahmalia (2017), dengan tema “Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh (BMA) dalam mendayagunakan dana zakat produktif dan pemberdayaan mustahiq oleh BMA peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BMA dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk bantuan modal uang tunai (*Cash Money*) dan dalam bentuk bantuan barang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh BMA, pertama BMA tidak memiliki tim pendamping yang profesional serta ahli dalam bidang usaha yang dijalankan mustahiq. Kedua, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan. Ketiga, gagalnya usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam. Dan pilihan usaha yang tidak tepat. Persamaan

penelitian ini adalah terdapat pada fokus peneliti pada lokasi penelitian yaitu BMA dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian terhadap peran BMA dalam mendayagunakan zakat produktif sedangkan peneliti fokus penelitian adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana .

Untuk mempermudah dalam melihat penelitian terdahulu serta melihat persamaan dan perbedaan yang terkait antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Table 2.1
Penelitian Terkait

NO	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta dan Renaldy Trisna Erlangga (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia zakat amat penting dikelola oleh pemerintah. Zakat sangat berpotensi untuk peningkatan usaha-usaha dalam menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik dan amanah. Maka dari itu, Zakat tidak hanya ibadah yang dinikmati individual namun juga berdampak dalam kehidupan sosial.	Persamaan penelitian ini terdapat pada focus penelitian terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif.	perbedaannya terdapat pada fokus penelitian terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat dimana cakupan Lembaga zakat yang diteliti lebih luas dan umum yang ada di Indonesia. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada satu Lembaga zakat yaitu Baitul Mal Aceh.

Lanjutan-2.1

2	<p>Benney Mabur Aurora dan Firdaus (2019)</p> <p>Baitul Mal dan Pemberdayaan masyarakat (studi terhadap dampak program Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah).</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal berperan aktif dalam membantu perekonomian miskin. Komunitas yang diberdayakan masih dapat diberikan keterampilan dan modal usaha hingga mereka dapat menjadi pembayar pajak bagi komunitas miskin lainnya.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui semua program yang ada serta Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan peneliti berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui satu program serta Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Aceh.</p>
---	--	--	--	--

Lanjutan-2.1

NO	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Muhlisin dan Agung Suprojo (2017) Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemberdayaan pada program pembangunan Pendidikan Kabupaten Sampang melalui penguatan visi bupati untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, sebagai sarana pendukung terhadap pendidikan formal dan non formal yang memerlukan partisipasi masyarakat.	Persamaan penelitian ini yaitu fokus penelitian terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat Adapun perbedaan penelitian ini terkait optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat dimana cakupan Lembaga zakat yang diteliti lebih luas dan umum yang ada di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus pada satu Lembaga zakat saja BMA	Adapun perbedaannya terdapat pada Lembaga yang diteliti yaitu BAPPEDA unit kesehatan dan kesejahteraan sosial Kabupaten Sampang. Sedangkan Lembaga yang diteliti peneliti yaitu Baitul Mal Aceh.

Lanjutan-2.1

4	<p>Muhammad Rizky Maulana, Asep Ramdan Hidayat dan Zaini Abdul Malik (2016)</p> <p>Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung dilakukan pada program Swadesi Dan optimalisasi pendayagunaan dana zakat di PKPU sudah baik.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat pada Lembaga yang diteliti yaitu PKPU Kota Bandung, sedang peneliti Lembaga yang dituju yaitu Baitul Mal Aceh.</p>
5	<p>Safri Miradj dan Sumarno (2014),</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Non Formal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dikabupaten Halmahera Barat</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah proses pemberdayaan yang dilakukan dilembaga Pendidikan non formal belum sesuai harapan masyarakat yang terlibat.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian terkait Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus peneliti terkait Lokasi yang diteliti yaitu kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan peneliti Lokasi yang dituju yaitu Baitul Mal Aceh.</p>

Lanjutan-2.1

N	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Alvian Ahmad Rizki (2019), “Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh”.	Hasil penelitian ini adalah proses penyaluran dana zakat dalam hal pencairan dana beasiswa SKSS berbanding terbalik dengan peraturan Pasal 10 peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang tata cara penerimaan dan pencairan dana zakat. dan pemanfaatan dana zakat pada beasiswa SKSS terdiri dari pemanfaatan sosial dan ekonomi	Persamaan penelitian terdapat pada fokus peneliti terkait program beasiswa SKSS pada Baitul Mal Aceh	Perbedaannya terdapat pada fokus peneliti terkait proses penyaluran dan pemanfaatan dana zakat melalui beasiswa SKSS. Sedangakan peneliti fokus penelitian terkait mekanisme dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS.
7	Sulfi Rahmalia (2017), “Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”.	Hasil penelitian ini adalah BMA dalam mendayagunakn zakat produktif yaitu memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai dan barang, kendala yang dihadapi tidak adanya pendapingannya,persepsi masyarakat,dan gagalnya usaha msthiik	Persamaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu Baitul Mal Aceh (BMA) dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaanya yaitu pada fokus penelitian terhadap peran BMA dalam mendayagunakanzaka t produktif sedangkan peneliti fokus penelitian adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS

2.5 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Dari kerangka diatas dapat digambarkan bahwa pada Baitul Mal Aceh dilakukannya penyaluran dana zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. salah satu programnya yaitu di sektor pendidikan. Peneliti ingin meneliti seputar mekanisme dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat pada sektor pendidikan ini. Dengan harapan agar dengan adanya program beasiswa tersebut mampu mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat

sehingga masyarakat yang miskin bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan guna untuk memahami fenomena yang berkenaan dengan yang yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Tohirin, 2012). Dimana pada jenis penelitian kualitatif ini peneliti melakukannya melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yakni menggali data yang bersumber dari lokasi atau *fenomenologis* di lapangan. Penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan cara mendatangi Kantor Baitul Mal Aceh di Jl. Teuku Nyak Arief No. 148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh , dan pada penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada narasumber-narasumber yang menjadi mustahik di Baitul Mal Aceh yang mendapatkan bantuan program beasiswa satu keluarga satu sarjana dari Baitul Mal tersebut. Pendekatan tersebut didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) guna untuk mengumpulkan data atau informasi dari buku-buku, jurnal-jurnal, catatan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Adapun pada pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif karena ingin melihat suatu kondisi ataupun fenomena yang terjadi dilapangan terkait optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa satu keluarga satu sarjana pada Baitul Mal Aceh. Dimana nantinya peneliti akan mengumpulkan fakta-fakta dari fenomena yang ada tersebut, kemudian dari fakta-fakta itu peneliti dapat menganalisis nya sehingga dapat menyajikan data, menarik kesimpulan serta dapat menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan fenomena yang ada tersebut.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti halnya dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus kehadiran seseorang atau kelompok dalam kondisi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Menurut Iwan Satibi (2011:74), objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud. Sedangkan menurut Dayan (1986), objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk memperoleh data secara lebih terarah.

Subjek penelitian merupakan bagian sumber riset yang dipilih guna mendapatkan keterangan penelitian atas segala sesuatu

yang terkait sehingga bisa memperoleh data atau keterangan (Amirin, 1995). Subjek penelitian juga diartikan sebagai bagian individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan peneliti dan pengumpulan jenis data penelitian (Idrus, 2009).

Maka dari itu, dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang strategis, karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang diamati. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, yakni orang yang memberikan informasi mengenai data yang diharapkan peneliti terkait penelitian yang sedang dilakukan. Subjek dari penelitian ini adalah Kasubbag, para Staf dan mustahik penerima bantuan dana program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Kode
1	Yuwita, SH, MH	Kepala Sub Bagian Pendistribusian (BMA)	01
2	Rizky Aulia, S. Pd.I	Tenaga Profesional (BMA)	02
3	Firdaus	Mustahik (USK)	03
4	Nurul Wahidah	Mustahik (STAI Tgk.Chik Pante Kulu	04
5	Rosmiati	Mustahik(UIN Ar-Raniry)	05

Sumber : Data diolah (2022)

Adapun kriteria pemilihan Narasumber, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan

informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria dan pertimbangan tertentu guna untuk kepentingan penelitian yaitu terkait beasiswa SKSS. Maka dari itu, peneliti menetapkan Narasumber yaitu pihak BMA yang bertugas di program beasiswa SKSS dan Mustahik yang merupakan penerima beasiswa SKSS tersebut.

Adapun kriteria narasumber Mustahik yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang menerima beasiswa SKSS
2. Salah satu mahasiswa dari tiga kampus yang disalurkan beasiswa SKSS yaitu UIN Ar-raniry, USK dan STAI Tgk. Chik Pante Kulu
3. Tidak terbatas oleh prodi dan fakultas

3.3 Sumber Data

Data dalam penelitian pada dasarnya mencakup dari semua informasi atau bahan yang yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus ditemukan, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data penelitian terletak pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian (Subroto, 1992 :34). Data penelitian dapat didalami dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif biasanya mencakup dokumen atau arsip, narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi dan benda, gambar serta rekaman (Nugrahani, 2014). Mengenai sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang meliputi data utama yaitu data yang didapatkan secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau informan. Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berperan sebagai informan. Maka Dari itu, wawancara mendalam merupakan Teknik mendalami data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk memperoleh data sebanyak mungkin, yang lengkap dan mendalam (Nugrahani, 2014).

Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh melalui Direktur, para staf, dan mustahik yang mendapatkan bantuan dana program beasiswa satu keluarga satu sarjana dari Baitul Mal Aceh.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:225) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperlukan untuk data utama. Oleh karena itu, data sekunder adalah sumber data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi lainnya atau pendapat para ahli yang berkenaan dengan penelitian ini (Azwar, 1998).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data guna mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati (Sudjana, 2022). Maka dari itu observasi adalah Teknik yang mengharuskan suatu pengalaman dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya, dalam hal ini peneliti mengamati langsung kegiatan dan mencatat segala sesuatu yang berkenaan dengan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui program satu keluarga satu sarjana pada Baitul Mal Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan (Bodgan, Biklen, Salim dan Syahrudin, 2012 : 119). Wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan pendalaman informasi tentang focus penelitian (Salim dan Syahrudin, 2012).

Pada umumnya, wawancara ini terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Moleong (2005), wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pewawancaranya mengatur sendiri masalah dan

pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan. Dimana instrument wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara yang mula-mula peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu, jawaban yang didapatkan bisa mencakup semua keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 2010). Sedangkan wawancara tidak terstruktur ini bebas dimana peneliti tidak menggunakan instrument wawancara.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa satu keluarga satu sarjana pada Baitul Mal Aceh. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini guna mendapatkan informasi langsung dan mendalam dari Direktur, Staf dan mustahik yang berkaitan dengan program beasiswa satu keluarga satu sarjana pada Baitul Mal Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam memperoleh data-data tertulis yang dihimpun dari Baitul Mal Aceh, mengenai lokasi mustahik yang mendapatkan dana bantuan program beasiswa satu keluarga satu sarjana dan

berbagai data yang lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

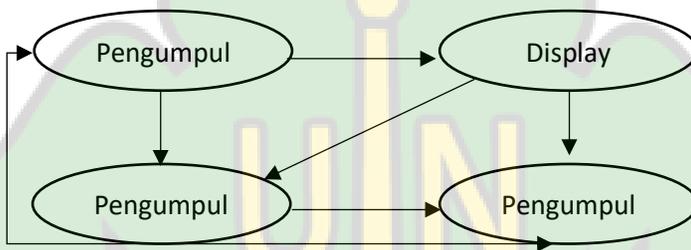
Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka langkah setelahnya yaitu peneliti menganalisa data dan informasi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:482), Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.

Dalam menganalisa data dan informasi itu peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dimana Teknik ini untuk menggambarkan atau menjelaskan data dan informasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa satu keluarga satu sarjana pada Bank Syariah. Hal ini dilakukan dengan cara mempresentasikan faktual yang didapatkan dari narasumber, kemudian mengevaluasi dengan ragam teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dan sesudah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas dalam

analisis data kualitatif, dilakukan secara interaktif dan berjalan terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data



Sumber : (Sugiyono, 2018)

Teknik analisis data yang digunakan, antara lain:

1. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2018:247-249), Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah guna melakukan pengumpulan data berikutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan diraih dan telah ditetapkan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun sering dipakai untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018 : 252-253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah disampaikan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Pada bagian ini akan dipaparkan terkait Baitul Mal Aceh dari hasil wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan, baik terkait sejarahnya, visi dan misi lembaganya, struktur organisasi serta perkembangan Baitul Mal Aceh ini. Adapun hasil tersebut diantaranya sebagai berikut :

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Sejarah awal Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh membentuk Baitul Mal Aceh ini dikarenakan adanya keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5 tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui keputusan Gubernur N0.18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai

beroperasi pada Bulan Januari 2004 (Baitulmal.acehprov.go.id, 2022).

Selanjutnya pada Tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul mal sebagai turunan dari UUPA dimana dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan Syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Baitulmal.acehprov.go.id, 2022).

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Sebagai Lembaga pengelola zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Amil yang amanah, transparan dan kredibel”. Adapun misi BMA untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya yaitu (Baitul Mal Aceh, 2022):

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzakki, Mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
2. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
3. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Pada dasarnya setiap instansi atau organisasi memiliki struktur organisasinya masing-masing, guna untuk memudahkan

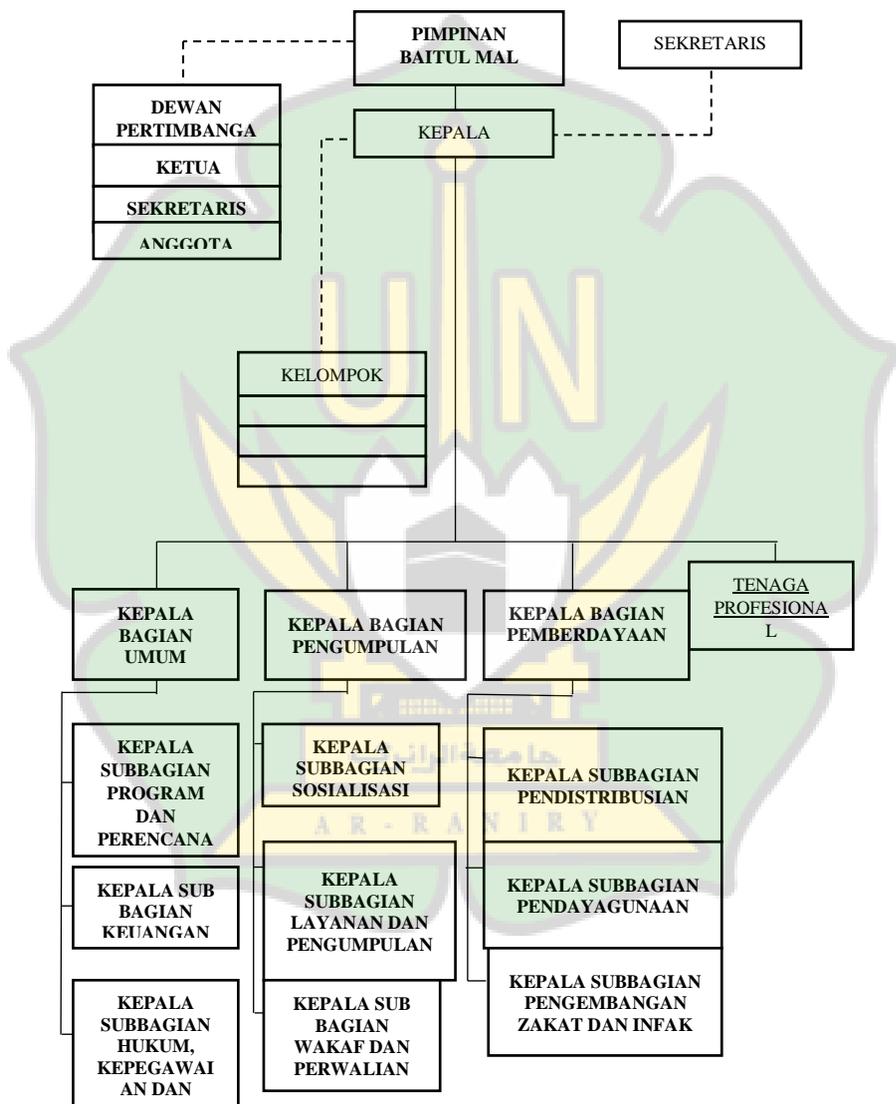
dalam mengkoordinasikan kewajiban hak dan komunikasi antar SDM ada didalamnya.

Pada dasarnya setiap instansi maupun organisasi itu membutuhkan struktur organisasi. Suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hirarki kepemimpinan. Dengan adanya sistem tersebut dapat menjelaskan bagaimana posisi, tanggung jawab, hak dan juga kewajiban setiap sumber daya manusia (SDM) didalamnya. Sehingga akan memudahkan suatu instansi dalam pengkoordinasian tanggung jawab, komunikasi antar SDM nya serta akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dari instansi tersebut.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan pola yang bisa mempertinggi efisiensi kerja, BMA sebagai sebuah institusi penting membangun hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan tercipta wujud kesatuan arah dan tanggung jawab serta pengawasan (Armiadi, 2008:191).

Berdasarkan yang diperoleh penulis, berikut struktur organisasinya :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber : Baitul Mal Aceh (Diolah oleh penulis, 2022)

Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infak secara transparan, profesional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan infaknya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahik diseluruh Aceh (Baitulmalaceh, 2022).

Dalam pelaksanaan Fungsional kerjanya Baitul Mal Aceh terbagi 3 unsur yaitu: sekretariat, Badan pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah (Baitulmalaceh, 2022).

1. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah unsur penyelenggara pelayanan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya seperti administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga professional yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Badan pelaksana

Badan pelaksana BMA merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, sedekah, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

3. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan Pertimbangan Syariah merupakan unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan Syariah terhadap pelaksanaan pengelolaan zakt,

infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal kabupaten\kota.

Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mengoptimalkan seluruh program penyaluran zakat, infak dan harta keagamaan lainnya

4.1.4 Perkembangan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh berperan sangat penting dalam mengelola harta zakat di Aceh, melihat Aceh merupakan salah satu provinsi yang sangat bagus dalam hal pelaksanaan zakat, dikarenakan hamper seluruh masyarakat Aceh beragama Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat di Aceh memperoleh poin yang sangat memuaskan dibandingkan dengan provinsi lain.

Baitul Mal Aceh telah banyak menyalurkan serta mengumpulkan dana zakat, infak serta harta keagamaan lainnya dengan baik sehingga BMA mendapatkan banyak penghargaan bukan hanya dari provinsi tapi juga nasional. Diharapkan kedepannya BMA mampu berinovatif lebih baik sehingga mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan harta keagamaan lainnya dengan baik serta dapat memberdayakan masyarakat lebih banyak guna kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh

Dalam penelitian ini diidentifikasi mekanisme pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dana yang tepat sehingga tercapainya tujuan dan harapan yang diinginkan. Mekanisme pemberdayaan tersebut dilihat dari sudut Baitul Mal Aceh dan Mustahik yang merupakan objek yang diteliti, yang kemudian nantinya dari hasil tersebut akan dianalisis oleh peneliti.

Adapun mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pada Baitul Mal Aceh yaitu meliputi tujuan, tahapan-tahapan, serta manfaat yang diperoleh.

4.2.1.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui program Beasiswa SKSS tersebut yakni dapat memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan. Dalam arti, program ini diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan inovasi teknologi dan peningkatan mutu serta daya saing daerah, juga dapat menghasilkan lulusan sarjana yang mandiri dan mampu mengembangkan masyarakatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pengurangan konsentrasi kemiskinan serta dapat memberikan kesempatan kepada

masyarakat kurang mampu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi (Baitul mal aceh, 2022).

Singkatnya program beasiswa ini menghadirkan salah satu dari anggota keluarga yang kurang mampu menjadi sarjana yang dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

4.2.1.2 Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa satu keluarga satu sarjana terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pendistribusian. Adapun hasil identifikasi tahapan-tahapan tersebut setelah dilakukan *research* dan wawancara kepada para narasumber yang berpengaruh pada Baitul Mal Aceh diantaranya yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini BMA mencoba membuka program Beasiswa SKSS ini untuk membantu mahasiswa kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Dalam hal ini BMA bekerja sama dengan pihak kampus untuk membuka pendaftaran beasiswa SKSS tersebut.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Pada sasaran penyaluran zakat Beasiswa SKSS tersebut BMA hanya

baru memfokuskan pada tiga kampus yang berada di Banda Aceh yaitu UIN Ar-raniry, Universitas Syiah Kuala dan STAI Tgk. Chik Pante Kulu.

Dalam pelaksanaan program beasiswa SKSS, BMA bekerja sama dengan UIN Ar-raniry, Universitas Syiah Kuala dan STAI tkg.Chik Pante Kulu. Dalam prosesnya pihak BMA menyurati ketiga kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke BMA agar memperoleh beasiswa SKSS, setelah diajukan maka pihak BMA melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi kriteria maka dapat diberikan beasiswa tersebut (Wawancara Narasumber 02, 13 september 2022).

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Syariah, hanya saja belum maksimal karena tidak semua universitas yang berada di Aceh menerimanya. Selain itu zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa SKSS memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mahasiswa kurang mampu agar bisa tetap kuliah dimana beasiswa tersebut diberikan per semester yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester terakhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup beasiswa

SKSS. Berikut besaran biaya penyaluran yang diterima mahasiswa penerima beasiswa SKSS:

Tabel 4.1
Satuan Besaran Biaya Penyaluran Beasiswa SKSS
Tahun 2022

NO	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/Semester	Rp. 400.00,- s/d 5.000.000,-
2	Uang Saku	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-

Sumber: Baitul Mal Aceh (Data diolah, 2022)

Dalam proses pelaksanaan Beasiswa SKSS juga diperkuat wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa SKSS yaitu mahasiswa UIN Ar-raniry, bahwasanya beliau mendapatkan informasi program Beasiswa SKSS melalui pihak fakultas pada Tahun 2019. Informasi ini disampaikan langsung oleh Dekan bahwa ada program beasiswa dari BMA yaitu SKSS, serta memberitahu juga tentang persyaratan yang harus dilengkapi dan pendaftaran lanjutan dilakukan di biro (Wawancara Narasumber 05, 13 oktober 2022).

Selain itu informasi yang didapatkan tentang beasiswa SKSS dikuatkan dengan hasil wawancara dengan mahasiswa USK. Bahwasanya beliau mendapatkan informasi tentang adanya beasiswa SKSS ini dari Akun instagramnya USK (Wawancara Narasumber 03, 15 september 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan mahasiswa penerima beasiswa SKSS ada beberapa informasi yang diperoleh dari pihak kampus dan media sosial seperti Instagram.

Untuk mendapatkan beasiswa SKSS para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMA, sementara itu disampaikan mahasiswa penerima beasiswa SKSS dari USK syaratnya tidak ada keluarga yang sudah sarjana, memiliki surat keterangan kurang mampu dari kepala desa. Begitu juga dipertegas mahasiswa Stai Tgk. Chik Pante Kulu bahwasanya jika ingin mendapatkan beasiswa tersebut haruslah mempersiapkan persyaratan administrasi sebagai calon penerima beasiswa SKSS (Wawancara Narasumber 03, 15 september 2022).

Persyaratan yang diberikan pihak BMA sebagai pihak penyelenggara kebijakan, karena pihak Lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun syarat yang ditentukan pihak BMA sesuai dengan yang telah dilampirkan mahasiswa calon penerima beasiswa SKSS, jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak BMA tidak bisa meloloskan mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa SKSS (Wawancara Narasumber 01, 13 september 2022).

3. Tahapan Pendistribusian

Zakat yang diterima oleh BMA diperoleh dari dana zakat yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada mustahik salah satunya yaitu pada penerima beasiswa SKSS tersebut.

Dana zakat yang bersumber dari gaji pegawai, perusahaan, dan lain-lain jumlahnya sangat besar. Dana tersebut disalurkan kepada program-program yang telah ditentukan oleh pihak BMA salah satunya program beasiswa SKSS. Dalam program beasiswa SKSS mahasiswa penerima beasiswa seperti pada saat perkuliahan tidak boleh mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah angka 3,00. Jika IPK berada dibawah 3,00 maka pihak BMA akan mencabut Beasiswa SKSS (Baitulmal. Acehprov.go.id, 2022).

Tapi dari pihak BMA masih kurang tegas dalam pernyataan tersebut, tidak ada sanksi atau teguran baik secara administrasi ataupun secara lisan untuk mahasiswa yang nilainya menurun dari IPK yang telah ditetapkan.

Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kasubbag Pendistribusian, bahwasanya beliau membenarkan bahwa pihak internal kurang MOU tentang data mahasiswa serta tidak adanya denda yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai yang dibawah IPK yang telah ditentukan (Wawancara Narasumber 01, 13 september 2022).

Kemudian diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa dari USK yang membenarkan bahwasanya setiap penerima beasiswa kurang ditegaskan dalam hal IPK perkuliahan (Wawancara Narasumber 03, 15 september 2022).

Maka dari itu, pihak BMA kedepannya lebih mengawasi dan memberikan pendampingan yang lebih tegas lagi kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut agar bisa terkontrol agar IPK tidak dibawah yang telah ditetapkan sehingga penyaluran beasiswa tersebut tercapai dan mahasiswa diberikan beasiswa selesai dalam Pendidikannya dengan nilai yang baik.

4.2.1.3 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis.

1. Manfaat sosial

Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antara muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama islam.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat yang diterima dalam bentuk beasiswa dan uang saku dapat memanfaatkan untuk keperluan perkuliahan dan membantu meringankan

beban orang tua yang kurang mampu dalam biaya Pendidikan beasiswa di perguruan tinggi.

2. Manfaat ekonomis

Pemanfaatan zakat secara ekonomis adalah meratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga al-quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.

Zakat yang diterima oleh mahasiswa dari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pihak Baitul Mal Aceh berharap dimanfaatkan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan perkuliahan dan tidak untuk dipergunakan ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan mahasiswa penerima beasiswa SKSS bahwasanya dana zakat yang berikan dimanfaatkan untuk membayar uang sewa kos, laptop dan biaya buku serta membeli Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kuliah (Wawancara Narasumber 04, 19 September 2022).

Sama halnya dengan wawancara dengan mahasiswa USK dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak BMA agar dimanfaatkan kepada hal yang menunjang perkuliahan (Wawancara Narasumber 03, 15 september 2022).

Dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang diberikan pihak BMA dimanfaatkan secara produktif. Hal tersebut bisa dilihat

dari penggunaan dana zakat untuk keperluan kuliah, dengan hal itu dana yang diberikan oleh BMA memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan kuliah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BMA.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini termasuk kedalam jenis pendanaan beasiswa penuh (*full scholarship*), seluruh biaya operasional mahasiswa mulai dari biaya kuliah dan biaya hidup sampai dengan studinya selesai ditanggung oleh program SKSS BMA. Dengan adanya beasiswa SKSS dapat mampu mengurangi biaya pendidikan yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa beasiswa SKSS dapat membantu/meringankan biaya Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang menunjang keperluan perkuliahan. Hanya saja waktu pencairan beasiswa SKSS tersebut kadang tidak sesuai yang diharapkan.

Diperkuat oleh wawancara dengan mahasiswa USK bahwa beasiswa sering cair diwaktu yang kurang tepat sehingga pembayaran SPP dibayar mandiri (Wawancara Narasumber 03, 15 september 2022).

Diperkuat juga oleh wawancara dengan mahasiswa UIN bahwasanya membenarkan beasiswa tersebut sering cairnya lambat, dan pas pembayaran SPP harus biaya sendiri dulu (Wawancara Narasumber 05, 13 oktober 2022).

Maka dari itu, diharapkan pihak BMA lebih mengoptimalkan lagi dalam hal penyaluran agar beasiswa yang

disalurkan cair diwaktu yang dibutuhkan. Misalnya pada jadwal pembayaran SPP, karena mahasiswa sering kesulitan untuk cari biaya pengganti.

4.2.2 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Sarjana

Berdasarkan teori bastian dalam Tangkilisan menyatakan bahwa optimalisasi dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Maka dari itu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Beasiswa SKSS ini dapat dilihat melalui tiga dimensi tersebut yang diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

1. Efisiensi

Dapat diuraikan dalam indikator sebagai berikut:

- Realisasi pemberdayaan masyarakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana

Pada indikator realisasi ini peneliti menganalisis program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini. berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kasubbag pendistribusian terdapat program bantuan dana pendidikan kepada masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat yang sebelumnya kurang mampu dalam membiayai pendidikannya bisa terbantu sehingga pendidikannya terjamin dan juga adanya program sosialisasi terkait zakat, pendidikan, sosial dan

lainnya yang mana dengan adanya program atau kegiatan tersebut bukan hanya dapat memberdayakan masyarakat melalui pendidikan juga dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, serta membangun pribadi yang berakhlakul karimah yang berguna bagi keluarga, bangsa dan juga agama.

- **Inovasi pemberdayaan masyarakat melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana**

Baitul Mal Aceh masih dalam upaya evaluasi dan monitoring agar dapat memberikan inovasi atau terobosan baru mengenai pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tenaga Profesional BMA diketahui bahwa terdapat inovasi baru yang dicanangkan oleh pihak BMA dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS yaitu dibentuknya kelompok pembagian mentor pendamping. Kelebihan dari adanya mentor pendamping ini yaitu memiliki kemampuan pendampingan yang lebih baik kepada para mustahik, serta memiliki kemampuan penyampaian informasi yang lebih cepat terkait beasiswa SKSS ini. Disamping itu juga bisa membangun ukhuwah antar pendamping dengan mustahik dan mustahik satu dengan yang lainnya. Tapi kekurangannya yaitu mentor pendamping dibebankan dengan kerja teknis lainnya

sehingga pendampingannya kurang optimal (Wawancara Narasumber 02, 13 September 2022).

Maka dari itu, diharapkan kedepannya inovasi yang telah dirancang bisa direalisasikan dengan optimal sehingga mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan.

- **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi salah satu indikator dalam dimensi efisiensi yang akan menjadi tolak ukur terjadinya peningkatan atau optimalisasi dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS. Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh bahwa manajemen sumber daya manusia yang ada di BMA khususnya di program beasiswa SKSS ini total berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Rincian Sumber Daya Manusia Pada
Program Beasiswa SKSS

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Pemberdayaan	1 orang
2	Kasubbag	2 orang
3	Tenaga Kontrak	1 orang
4	Relawan	4 orang

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari tabel 4.4 dapat dilihat rincian sumber daya manusia pada program beasiswa SKSS yang bertugas menyalurkan beasiswa SKSS demi pemberdayaan

masyarakat, hanya saja berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag pendistribusian diketahui sistem kerja sama dan operasionalnya masih tergolong lemah sehingga outputnya tidak tercapai (Wawancara Narasumber 01, 13 September 2022).

- **Dukungan pemerintah**

Dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mewujudkan suatu optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Disamping kegiatan atau program ini telah dilaksanakan oleh BMA, akan tetapi diperlukan juga dukungan dari instansi pemerintah lainnya yang memiliki kaitan dengan program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMA bahwa dinas-dinas yang termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) merupakan instansi utama yang memberikan dukungan penuh berupa anggaran zakat terhadap upaya pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini (Wawancara Narasumber 1, 13 september 2022).

Oleh karena itu, dukungan tersebut amat sangat membantu terhadap program tersebut. diharapkan kedepannya bukan hanya dinas-dinas yang berada di SKPA tapi juga ikut sertanya dinas-dinas lainnya sehingga program ini makin unggul serta mampu menciptakan

generasi bangsa yang terjamin pendidikannya, terampil juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Efektivitas

- Tujuan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS

Pada program peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS yang dicanangkan oleh BMA pastinya memiliki tujuan tersendiri untuk mewujudkannya diperlukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi bisa dijalankan dengan baik apabila semua pihak bekerja sama dalam mencapainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Pendistribusian serta tenaga professional BMA dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini adalah dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui Pendidikan, dalam arti masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai Pendidikan bisa terbantu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta menciptakan generasi bangsa serta sumber daya manusia yang berpendidikan yang berguna bagi bangsa.

- Target peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS

Target dapat dimaknai sebagai tolak ukur dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, jika target yang

telah ditentukan dapat tercapai maka dapat dikatakan suatu program tersebut sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuannya. Sasaran atau objek dari pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa SKSS ini adalah masyarakat Aceh yang tergolong dalam masyarakat kurang mampu, Untuk sekarang hanya diperuntukkan oleh masyarakat berstatus mahasiswa dari Kampus UIN Ar-raniry, Universitas Syiah Kuala dan STAI Tgk.Chik Pante Kulu dengan target Pendidikan S1 selama 4 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Pendistribusian dapat diketahui bahwa target atau sasaran objek dari peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini masih tergolong kurang berhasil karena banyak terdapat mustahik atau mahasiswa penerima beasiswa yang nilai kuliahnya menurun serta terlambat dalam proses pendidikannya yaitu tidak mencapai target yang telah ditentukan pihak BMA (Wawancara Narasumber 01, 13 September 2022).

3. Ekonomis

- Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program atau kegiatan sehingga program dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di BMA dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS sudah mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini tidak menjadi hambatan dalam pencapaian optimalisasi program.

- **Sumber Daya Manusia**

Pada pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini tentunya diperlukan suatu sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan dan fasilitasi penunjang pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini. Berikut merupakan tabel sumber daya yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS ini:

Tabel 4.4
Pengelompokan Sumber Daya Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Beasiswa SKSS

NO	Sumber Daya	Jenis
1	APBD Provinsi Aceh	Internal
2	Sumber Daya Manusia Baitul Mal Aceh	Internal
3	Dana zakat dari dinas- dinas SKPA	Eksternal

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa BMA dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS tidak hanya mengandalkan sumber daya internal melainkan mendapatkan juga Sumber daya eksternal yang ada diluar BMA.

- **Faktor penghambat optimalisasi penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS**

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program tentunya tidak terlepas dari yang namanya hambatan. Dari hambatan-hambatan inilah dapat menjadi bahan evaluasi serta usaha perbaikan dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan yang optimal serta sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Adapun faktor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS adalah sebagai berikut:

- a. Dari pihak internal masih kurangnya MOU tentang data mahasiswa sehingga mahasiswa kurang terkontrol karena tidak adanya sanksi atau teguran jika terlambat proses pendidikannya atau nilainya menurun (Wawancara Narasumber 01, 13 september 2022).
- b. Kurangnya kerja sama dengan pihak administrasi kampus, jadi MOUnya tidak terikat. Juga karena kurangnya

pendampingan dari pihak BMA sehingga banyak mahasiswa tidak sesuai target dalam pendidikannya (Wawancara Narasumber 01, 13 september 2022).

Diperkuat dengan wawancara dengan tenaga profesional BMA bahwasanya membenarkan kurangnya kerja sama dan pendampingan sehingga telat pengesahan anggaran yang mengakibatkan penyaluran beasiswanya sering terlambat.

- c. Kurangnya data perkembangan penerima beasiswa terkait akademisnya, kehidupan sehari-harinya, akhlaknya kepribadian yang mencerminkan hak dia penerima zakat belum terkontrol dengan baik (Wawancara Narasumber 02, 13 september 2022).
- d. Kurangnya pendampingan yang diberikan oleh pihak BMA kepada mustahik (penerima beasiswa).

Diperkuat dengan wawancara dengan Kasubbag Pendistribusian bahwasanya membenarkan kurangnya pendampingan yang diberikan sehingga penerima beasiswa kurang terkontrol (Wawancara Narasumber 01,13 September 2022).

Begitu juga wawancara dengan staf profesional BMA bahwasanya membenarkan kurangnya pendampingan tersebut dan pendamping dibebankan dengan kerja teknis lainnya sehingga pendampingan dan pemberdayaan yang diberikan kurang optimal.

Maka dari itu pihak BMA harus melakukan upaya yang lebih baik lagi untuk mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa SKSS sehingga mampu berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan yaitu dapat memberikan kesempatan kepada banyak masyarakat kurang mampu yang ingin dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, sehingga banyak masyarakat yang terjamin kualitas hidupnya serta mampu menghasilkan generasi bangsa yang kompeten, berakhlakul karimah serta menghasilkan lulusan sarjana yang mandiri dan mampu mengembangkan masyarakatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pengurangan konsentrasi kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti selesaikan dengan metode penelitian kualitatif. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS meliputi tujuan, tahapan-tahapan serta manfaat yang diperoleh. Adapun tujuannya yaitu memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, tahapan-tahapannya terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pendistribusian serta manfaat yang diperoleh yaitu manfaat sosial dan manfaat ekonomis yang mana mekanisme tersebut diharapkan dapat terealisasi dengan baik.
2. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS dilihat dari tiga dimensi optimalisasi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang diuraikan dengan beberapa indikator-indikator, yang masih tergolong kurang optimal, karena banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi serta output yang kurang tercapai. Akan tetapi disebalik itu Baitul Mal Aceh sedang berupaya melakukan evaluasi yang lebih baik yang diharapkan kedepannya dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian peneliti analisis, ada beberapa saran yang peneliti pertimbangkan untuk diberikan diantaranya itu ada saran akademik, saran praktis dan juga saran kebijakan, yang nantinya dapat menjadi masukan kedepannya.

Adapun saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Saran Akademik

Pada saran akademik ini setelah peneliti selesai melakukan penelitian dan menyusunnya, peneliti memberikan masukan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu:

a. Pihak Akademisi Kampus

Bagi pihak akademisi kampus diharapkan selalu mendukung para mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, sehingga hasil penelitian nantinya akan lebih optimal, yang dapat menjadi salah satu kontribusi para peneliti untuk diberikan kepada pihak kampus, yang kemudian kedepannya dapat dimanfaatkan para mahasiswa lain serta menjadi sumbangan referensi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh ini.

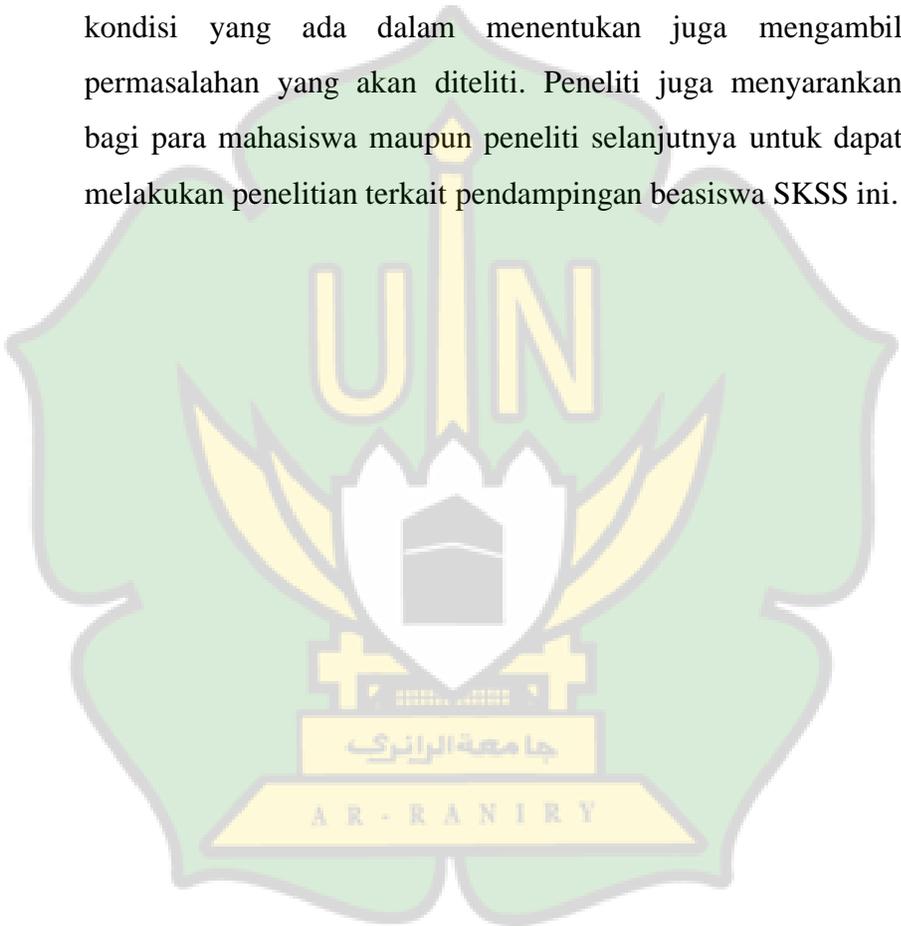
b. Institusi terkait (Baitul Mal Aceh)

Bagi pihak Baitul Mal Aceh diharapkan kedepannya bisa mengoptimalkan penyaluran beasiswa SKSS ini dengan mengevaluasi SDM yang bertugas di program tersebut serta pendampingan yang lebih baik terhadap para mustahik.

2. Saran Praktis

a. Mahasiswa dan peneliti selanjutnya

Bagi para mahasiswa dan juga peneliti selanjutnya diharapkan kedepannya dapat lebih jeli dan update dengan kondisi yang ada dalam menentukan juga mengambil permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga menyarankan bagi para mahasiswa maupun peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terkait pendampingan beasiswa SKSS ini.



DAFTAR PUSTAKA

Baitulmalaceh (2022). Baitul Mal Aceh. Diambil pada Oktober 2022, dari

<https://baitulmal.acehprov.go.id> tentang Baitul Mal Aceh.

Tangkilisan, Hessel Nogi. (2007). Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif,*

Kuantitatif dan R&d. Bandung: alfabeta

Aulia, Teuku Reza (2019). *Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan zakat*

Produktif dan dampaknya pada pendapatan usaha mustahik (studi kasus pada Baitul mal aceh). Skripsi Publikasi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Emzir. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Cet-ke-5.

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Moleong Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Cet

ke-40. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nadia Wulandari, dkk. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi*

Covid-19 pada Ikatan Remaja Masjid Rt.04 Loa Kulu.

Kumawula, Vol.

3, No.3, Desember.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).*

Cet-9. Bandung: CV. Alvabeta.

Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001)Sulistiati, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi* (Jakarta: Balai Latihan Dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004)

Rosyadi, *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*, (Sumut: Mentari Press, 2003)

H. Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*,
(Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013), Hal 268

Edi Suandi Hamid, Hendri Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennial III*,
Yogyakarta : UII Press, 2000, Hal.1

Saifudin, 2012. Zuhri, *(Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*,
Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Asep Jaenudin,2011. "Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Umat Pusat) Skripsi SI
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Hadijah, 2016. (*Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi*

Dalam Meningkatkan Prestasi) Banda Aceh :
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
(diakses pada tanggal 10 september 2019)

Haris AlAmin.2015. *penegelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif.*

Vol.14 No.2 Lhokseumwe.

Karistiyanti, (*Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang*

Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP

Universitas Syiah Kuala). Skripsi, Banda Aceh:
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah
Kuala

(diakses pada tanggal 10 september 2019)

Muhammad Bukhori, 2011(” *Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa*

Etos DiDompot Dhuafa Republika,”) Skripsi SI
Fakultas Ilmu

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10
september 2019)

Ramadhan Dewi Respaningrum, 2012. (“*Manajemen Pendayagunaan*

Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012),”) Fakultas
Dakwah, Institut Agama
Islam Negeri Walisongo
Semarang

Wahiji, Karamoy, Kapojos, “*Analisis pengukuran kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan pendekatan Value for money pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.*” Jurnal LPPM Bidang Ekasosbudkum, vol 6, no 1, (2022):335-344.

Pratiwi, Nursandia, “*Analisis Pengukuran kinerja Value For Money pada Badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Blitar.*” Program pendidikan vokasi Universitas Brawijaya (2017).

Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor publik di Indonesia.* Yogyakarta : BPFE.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

a) Pertanyaan wawancara untuk Ketua Badan Baitul Mal Aceh

1. Berdasarkan Badan pusat Statistika (BPS) tercatat tingkat kemiskinan di Aceh meningkat 0,20 persen atau 16 ribu orang sejak Maret 2021 hingga September 2021 menjadi 15,53 persen. Secara total, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850 ribu orang. (CNN Indonesia, 2021). Nah, menurut anda, dari Baitul Mal sendiri apa solusi yang dilakukan dalam menangani tingkat kemiskinan tersebut ?
2. Menurut anda apa saja program untuk pemberdayaan masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh?
3. Pada sektor Pendidikan, program apa saja yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh?
4. Pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, berapa jumlah penerima Beasiswa tersebut?
5. Bagaimana proses dan mekanisme Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan program beasiswa tersebut ?
6. Apakah ada hubungan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam hal penyaluran beasiswa tersebut?
7. Menurut anda Apakah ada kendala atau hambatan dalam mekanisme penyaluran beasiswa tersebut

Lampiran 1-(Lanjutan)

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan penyaluran dana program tersebut?

b)Pertanyaan wawancara kepada Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh

1. Menurut anda dalam memberdayakan masyarakat khususnya Pada sektor Pendidikan, program apa saja yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh?
2. Pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, berapa jumlah penerima Beasiswa tersebut?
3. Bagaimana Lembaga menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan program beasiswa tersebut?
4. Bagaimana mekanisme Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan program beasiswa tersebut ?
5. Apakah ada hubungan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam hal penyaluran beasiswa tersebut?
6. Apa saja kendala dan hambatan saat penyaluran beasiswa tersebut?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan penyaluran dana program tersebut?

Lampiran 1-(Lanjutan)

c)Pertanyaan wawancara kepada Mustahik

1. Bagaimana pandangan anda terhadap Baitul Mal Aceh?
2. Sudah berapa lama anda menjadi Mustahik (Penerima Beasiswa) pada Baitul Mal Aceh?
3. Apa manfaat yang diterima dari program beasiswa tersebut?
4. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh?
5. Menurut anda apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam hal penyaluran beasiswa tersebut?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran beasiswa yang telah anda dapatkan?
7. Apakah menurut anda penyaluran beasiswa Pendidikan telah tepat sasaran?
8. Apakah menurut anda penyaluran beasiswa Pendidikan telah optimal?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara

- a) Wawancara dengan Kasubbag Pendistribusian BMA



- b) Wawancara dengan Tega Profesional BMA

- c) wawancara dengan mustahik mahasiswa UIN Ar-Raniry



Lampiran 2-(Lanjutan)

- d) Wawancara dengan mustahik Mahasiswa STAI Tgk Chik Pante Kulu



- e) wawancara dengan Mustahik Mahasiswa Universitas Syiah

